

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, tuntutan terhadap paradigma good corporate governance (GCG) dalam seluruh aktivitas perekonomian tidak dapat dielakan lagi. Apabila kondisi GCG dapat dicapai maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih (clean government) dan terbentuknya masyarakat sipil (civil society) serta tatakelola perusahaan yang baik (Effendi A, 2016:144). Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral dari seluruh pelaku pasar, harga pasar saham bertindak sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan. Tujuan yang paling penting bagi perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan harga saham perusahaan. Namun pihak manajemen atau manajer perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Sehingga timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Masalah *corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada *agency theory* yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Selain memiliki kinerja keuangan yang baik perusahaan juga diharapkan memiliki tata kelola yang baik. Peningkatan nilai perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimumkan modal kerja yang dimiliki. Apabila tindakan antara manajer dengan pihak lain tersebut berjalan sesuai, maka masalah di antara kedua pihak tersebut tidak akan terjadi.

Dalam kenyataannya penyatuan kepentingan kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan masalah. Adanya masalah di antara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi (*agency problem*). Adanya *agency problem* tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Untuk itu diperlukan sebuah kontrol dari pihak luar dimana

peran *monitoring* dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara *principal* dengan agen. Agen atau pihak manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadinya sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Wien Ika Permanasari, 2010: 1). Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agensebagai pertanggungjawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta memberikan kompensasi kepada agen. Dalam perspektif teori keagenan, agen yang *risk adverse* dan yang cenderung mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan *resources* (berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan agensi ini akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan biasamengendalikan perilaku manajemen agar tidak menghamburkan *resources* perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang tidak layak, maupun dalam bentuk *shirking*. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme *good corporate governance* (GCG) dijadikan sebagai kontrol bagi perusahaan agar tetap pada batasan yang seharusnya. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut maka ada beberapa indikator pendukung mekanisme GCG, diantaranya Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Dharma (2013) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diprosikan dengan menggunakan tiga variabel bebas yaitu dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan. Latar belakang pelaksanaan *corporate governance* adalah ketergantungan modal eksternal bagi perusahaan untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan. Kepastian seperti itu disebut dengan sistem *corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sedangkan dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Forum for Corporate Governance in Indonesia 2006). Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen. Mekanisme *corporate governance* ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik. Diharapkan bahwa *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Bapepam melalui SE03/PM/2000

dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-315/BEJ/06/2000 komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, salah satu diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan mekanisme GCG yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya manipulasi dalam informasi yang disajikan (Effendi, 2016:59). Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. (Ikatan Komite Audit Indonesia, dalam Effendi 2016:48). Kepemilikan manajerial merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan (direksi dan komisaris) atau seluruh modal dalam perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalisir adanya konflik keagenan dalam perusahaan adalah dengan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham perusahaan tersebut, yaitu dengan cara kepemilikan manajerial (insider ownership). Sehingga selain menjadi pengelola perusahaan, manajemen juga berperan sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan (Effendi, 2016:59). Dalam penelitian Nugraha (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebagai salah satu alat mekanisme *corporate governance* kehadiran institusi yang mengawasi sebagian besar saham akan menjadi alat monitoring yang efektif untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga dapat mengurangi biaya keagenan.

Sehubungan dengan teori keagenan, maka pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja manajemen adalah pemilik (*shareholders*). Untuk kepentingan pemilik itulah dewan komisaris dibentuk dan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan mekanisme CG yang tepat. Dengan mekanisme CG yang tepat diharapkan manajemen akan dapat memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan kepentingan pemilik. Untuk dapat menciptakan sistem *corporate governance* yang baik pada perusahaan publik di Indonesia, maka akuntabilitas dewan komisaris yang selama ini diragukan harus ditingkatkan, antara lain dengan cara membentuk komisaris independen dan komite audit (Apriyanti dan Juliarto, 2006). Hubungan antara jumlah anggota dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh perspektif fungsi *service* dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan. Karena kedua fungsi tersebut lebih cenderung diberikan oleh dewan komisaris untuk kondisi struktur *corporate governance*. Fungsi *service* menyatakan bahwa komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasihat kepada manajemen (dan direksi) (Darwis, 2009). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan

mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik dan efisien sehingga akan menarik investor kemudian nilai dari perusahaan juga akan naik. Profitabilitas merupakan keuntungan dalam bentuk materi yang diperoleh oleh sebuah perusahaan akibat dari usahanya. Brigham dan Houtson (2010:146) berpendapat, profitabilitas adalah hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Profitabilitas yang diperoleh perusahaan tersebut akan digunakan untuk memberi deviden pada para pemegang saham dan juga digunakan untuk menambah modal perusahaan agar dapat memperbesar operasinya. Profitabilitas dalam penelitian ini digambarkan dengan Rasio *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Assets* (ROA). Rasio *Return On Equity* (ROE) mencerminkan pengaruh dari seluruh rasio lain dan merupakan ukuran kinerja tunggal yang terbaik dilihat dari akuntansi (Brigham, 2010 :150). ROE merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana ekuitas atau modal suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah *return* (keuntungan) bagi perusahaan. *Rasio Return On Assets* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan untuk menilai seberapa besar nilai suatu perusahaan dapat menggunakan rasio Tobin's Q. Yang mana di dalam rasio Tobin's Q tersebut semakin tinggi nilainya tersebut maka menunjukkan perusahaan mempunyai prospek pertumbuhan yang semakin baik. Untuk menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan rasio Tobin's Q dapat dilakukan dengan perhitungan. Pada penelitian Kawatu (2009) menyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan adalah positif signifikan, sedangkan Darwis (2009) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja/nilai perusahaan. Shakir (2008) dalam Wahyudi (2010) menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Tetapi dalam penelitian Praditia (2010) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya dengan adanya komisaris independen mampu mengurangi nilai perusahaan. Susanti (2010) menyimpulkan bahwa board size (B.SIZE) atau jumlah dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari hubungan tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah *board size* (ukuran dewan direksi) yang meningkat disesuaikan dengan kondisi perusahaan, berarti pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi semakin baik, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan nilai perusahaan akan ikut meningkat. Faizal (2004) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi yang kecil meningkatkan kinerja perusahaan. Susanti (2010), menemukan hubungan negatif antara proporsi luar direksi dan kinerja perusahaan antar perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. *Corporate governance* yang

efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham.

Dari uraian di atas, tampak bahwa *good corporate governance* yang mempengaruhi nilai perusahaan masih merupakan hal yang menarik untuk diuji lebih lanjut, maka penelitian ini diberi judul “ **Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur (sektor property) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Mengenai pengaruh antara *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

Dari rumusan masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran komisaris independen terhadap nilai perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan

1.3.2 Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis tentang manfaat penerapan dan mekanisme *good corporate governance* dalam meningkatkan nilai perusahaan.
2. Bagi Peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran terutama tentang *good corporate governance*.
3. Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan *good corporate governance*.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan dalam melanjutkan penelitian terkait dengan analisis pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.
5. Bagi investor, calon investor, dan badan otoritas pasar modal, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai relevansi dari *good corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan dengan nilai perusahaan. Serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan dalam memilih perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan yang tinggi.